

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						66.008.375.530		21.659.426.756		20.915.340.176		18.648.089.283		18.648.089.283	118,91	89,16		18.648.089.283	145,38	28,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAMPAUI	
	2.13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						66.008.375.530		21.659.426.756		20.915.340.176		18.648.089.283		18.648.089.283	118,91	89,16		18.648.089.283	145,38	28,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	2.13.01	Program : Penujng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						38.908.375.530		12.459.426.756		11.291.521.261		9.856.042.992		9.856.042.992		87,29		9.856.042.992		25,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		A		A		112,5		A		112,5		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAMPAUI
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	2.13.02	Program : Penataan Desa						2.700.000.000		1.100.000.000		60.160.000		47.675.000		47.675.000		79,25		47.675.000		1,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
						Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	20		30		30		30		30		100		30		150		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	2.13.03	Program : Peningkatan Kerja Sama Desa						5.150.000.000		1.550.000.000		4.264.403.315		4.224.297.283		4.224.297.283		99,06		4.224.297.283		82,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
						Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	Persen	11,48		5		5		5		5		100		5		43,55		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI
						Persentase pembangunan kawasan perdesaan	Persen	2		2		2		2		2		100		2		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	2.13.04	Program : Administrasi Pemerintahan Desa						12.650.000.000		4.350.000.000		1.774.470.600		1.397.661.600		1.397.661.600		78,76		1.397.661.600		11,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
						Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	50		50		50		143,33		143,33		286,66		143,33		286,66		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAMPAUI
						Persentase desa tertib administrasi	Persen	30		40		40		60		60		150		60		200		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAMPAUI
						Persentase pembinaan BUM Desa	Persen	20		40		40		40		40		100		40		200		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI
						Persentase pemberian aset desa	Persen	20		50		50		60		60		120		60		300		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAMPAUI
						Persentase kepala desa yang dibina	Persen	30		40		40		40		40		100		40		133,33		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI
						Persentase aparatur desa yang dibina	Persen	30		45		45		60		60		133,33		60		200		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAMPAUI
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	2.13.05	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat						6.600.000.000		2.200.000.000		3.524.785.000		3.122.412.408		3.122.412.408		88,58		3.122.412.408		47,31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
						Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	100		100		100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI
						Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	100		100		100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI
						Persentase LSM aktif	Persen	100		100		100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI
						Persentase PKK aktif	Persen	100		100		100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI
						Persentase Posyandu aktif	Persen	100		100		100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI
						Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	5		5		5		5		5		100		5		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI
Rata-rata capaian kinerja RKPD (%)		104,84																							
Predikat kinerja		MELAMPAUI																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:		1. Pencapaian target kinerja dilakukan pada indikator yang mendukung capaian program perangkat daerah; 2. Pagi anggaran dilakukan pada kegiatan yang mendukung capaian program; 3. Pelaksanaan kegiatan, sehingga dilakukan pada kegiatan, sehingga yang mendukung capaian kinerja prioritas Perangkat Daerah.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:		1. SDM pelaksana kegiatan masih kurang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas/kompetensi; 2. pagi anggaran masih belum optimal; 3. waktu pelaksanaan kegiatan belum sesuai rencana;																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:		1. memonitoring waktu daya yang ada saat menginisiasi jasa pihak ketiga; 2. melakukan progresnya anggaran atau membuat pagi anggaran di perusahaan;																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:		1. menyerap realisasi pelaksanaan kegiatan, agar capaian target dapat dilaksanakan; 2. tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja program perangkat daerah; 3. lebih meningkatkan perencanaan dan anggaran kegiatan dalam perencanaan anggaran;																							
		4. lebih meningkatkan perencanaan dan anggaran kegiatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja;																							